

**PERAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (KJKS BMT) DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN MELALUI *COMMUNITY BASED DEVELOPMENT*
(CBD) DI KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

**HERI WARSITA
BP. 06193005**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Heri Warsita (06193005) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2010. Pembimbing I Drs. Syaiful, M.Si dan Pembimbing II Roni Ekha Putera, SIP, M.PA. Judul Skripsi Peran Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui *Community Based Development* (CBD) di Kabupaten Agam.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) dalam menanggulangi kemiskinan melalui *Community Based Development* (CBD) di Kabupaten Agam. *Community Based Development* adalah pendekatan pembangunan masyarakat yang tidak hanya melalui aspek ekonomi tapi juga didasarkan pada aspek sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah agar terciptanya pembangunan yang *bottom up*, sehingga masyarakat akan berkembang sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki.

Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah bagaimana proses pembentukan KJKS BMT Kabupaten Agam dan peran KJKS BMT dalam menanggulangi kemiskinan melalui *Community Based Development*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut menggunakan kerangka analisis berdasarkan prinsip *Community Based Development* yang dikemukakan oleh Herbert J. Rubin serta tahapan-tahapan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, karena aspek pemberdayaan dalam *Community Based Development* adalah komponen penting dalam pembangunan masyarakat.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan unit analisis berupa lembaga dan menerapkan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis data primer dan sekunder serta uji keabsahan data berdasarkan pada analisis etik dan emik. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pemberdayaan yang dilakukan hanya mencapai pada tahapan dasar, yaitu tahap kesadaran kepada masyarakat, sementara pengkapasitasan dan pendayaan belum tersentuh. Prinsip *Community Based Development* juga masih belum optimal, terutama dalam hal minimnya pendampingan dan pembiayaan yang dilakukan sehingga tidak dapat memaksimalkan sumber daya dan usaha masyarakat.

Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan, KJKS BMT, Community Based Development, dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun termasuk Indonesia sendiri yang masih terbelenggu oleh lingkaran kemiskinan. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin¹.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin setiap periode tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005 (Tabel 1.1). Namun pada tahun berikutnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terhitung pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Dibandingkan dengan

¹ Badan Pusat Statistik. *Data Strategis BPS*. CV Nasional Indah. Jakarta. 2009. hal. 37

penduduk miskin pada bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, di mana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen. Dua tahun berikutnya, jumlah penduduk miskin menurun kembali menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada Maret 2008 dan 32,53 juta (14,15 persen) pada Maret 2009².

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Perhitungan BPS dan Bank Dunia, 1996–2009

Tahun	BPS		Bank Dunia			
	Penduduk Miskin		Penduduk Miskin di Bawah US\$1 PPP		Penduduk Miskin di Bawah US\$2 PPP	
	Jumlah (juta)	Persentase	Jumlah (juta)	Persentase	Jumlah (juta)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1996	34,01	17,47	15,40	7,80	99,60	50,50
1998	49,50	24,23	-	-	-	-
1999	47,97	23,43	24,90	12,00	135,00	65,10
2000	38,70	19,14	20,90	9,90	125,30	59,50
2001	37,90	18,41	19,70	9,20	125,20	58,70
2002	38,40	18,20	15,50	7,20	115,60	53,50
2003	37,30	17,42	14,50	6,60	110,00	50,10
2004	36,10	16,66	16,50	7,40	109,10	49,00
2005	35,10	15,97	13,60	6,00	102,10	45,20
2006	39,30	17,75	19,50	8,50	113,80	49,60
2007	37,17	16,58	15,50	6,70	105,30	45,20
2008	34,96	15,42	14,00	5,90	100,70	42,60
2009	32,53	14,15	-	-	-	-

Sumber: Data Strategis BPS Tahun 2009

Sesuai dengan uraian tentang perkembangan kemiskinan di Indonesia pemerintah telah membuat beberapa program untuk menanggulangi masalah

² *Ibid.*, hal. 39

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Agam, pemerintah daerah setempat membuat suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikenal dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid (PPKBM). PPKBM ini adalah penanggulangan kemiskinan yang berazaskan pada ekonomi syariah. Sebagai tindak lanjut dari program itu maka dibentuklah lembaga keuangan syariah berupa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (KJKS BMT).

Proses terbentuknya KJKS BMT didasarkan pada inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Agam yang mengamati tentang jumlah angka kemiskinan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Setelah dilakukan survey penajaman kepada masyarakat miskin, ternyata permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah menyangkut minimnya dana yang dimiliki dalam pengembangan usahanya. Disamping itu, akibat lemahnya akses masyarakat untuk menjangkau pinjaman dari bank karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank terkait proses realisasi pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Amin. 2006. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Data Strategis BPS*. Jakarta: CV Nasional Indah.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat No 35/07/13/TH.XII*. Padang: BPS Prov. Sumbar.
- BPS dan BAPPEDA Kab. Agam. 2009. *Agam Dalam Angka*. Lubuk Basung: BPS Agam press.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djajadiningrat, Surna. T. 2003. "Community Development Dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan" dalam Bambang Rudito et.al (Penyunting). *Akses peranserta masyarakat. Lebih jauh memahami community development*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Dokumen Administrasi Perekonomian Setda Kab. Agam Tahun 2009 (*Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pola KJKS BMT di Kabupaten Agam*)
- Dokumen Administrasi Perekonomian Setda Kab. Agam tahun 2009 (*Narasi BMT Kabupaten Agam*)
- Dokumen KJKS Agam Madani Bukik Batabuah Tahun 2009
- Dokumen KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan Tahun 2009
- Dokumen KJKS BMT Agam Madani Tiku Utara Tahun 2009
- Fahrian, Feri. 2009. *Pemberantasan Kemiskinan Struktural Melalui Cara yang Struktural*. <http://sergai.wordpress.com/2009/12/22/pemberantasankemiskinan-struktural-melalui-cara-yang-struktural/>. Diakses 17 Mei 2010
- Faisal, Sanafiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo,
- Harmen. *BMT Agam Menjadi Contoh Nasional*. <http://www.padang-today.com/> diakses 25 Desember 2009